

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penemuan yang dilakukan oleh Arta (2008) dengan judul “Eksistensi asuransi kredit sebagai salah satu alternatif bagi bank dalam mengatasi risiko kredit macet”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta untuk mengalihkan resiko atas kredit yang diberikan kepada nasabah.

Setiap calon debitur atau nasabah yang mengajukan kredit wajib mengikuti program asuransi kredit dan besarnya kontribusi yang harus dibayarkan akan langsung dipotong saat realisasi kredit. Asuransi kredit ini sebagai salah satu upaya yang digunakan bank untuk mengatasi kredit macet yang disebabkan karena debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, dimana pelunasan atau sisa kredit debitur akan dilunasi oleh pihak asuransi, yaitu AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta.

Kajian yang dilakukan oleh Halomoan (2010) dengan judul “Peranan lembaga asuransi dalam pemberian kredit perbankan (studi pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Cabang Kabanjahe)” menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (persero) Cabang Kabanjahe memberikan perlindungan kredit bagi nasabah kecil dengan suatu pendekatan yang adil dan tepat untuk menciptakan kondisi dimana pembayaran kredit nantinya tetap dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet oleh nasabah.

Sehingga bank tetap dapat beroperasi secara konsisten. Dalam kegiatan tersebut PT. Bank Negara Indonesia (persero) Cabang Kabanjahe memberikan perlindungan asuransi dalam perjanjian kreditnya berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Listra(2013) dengan judul “Analisis penerapan asuransi dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Malang”. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan KPR BTN Syariah menerapkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

Pembayaran premi asuransi hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa kredit belum berjalan. Dan premi asuransi akan dibagikan pada akhir pembiayaan jika tidak terjadi klaim pada akhir masa kredit, tetapi bukan 100%. Kemudian untuk klaim asuransi kebakaran, lembaga asuransi mengganti kerugian sesuai akad yang telah disepakati. Sedang klaim asuransi jiwa, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah kreditnya sampai pada bulan ditutupnya kredit, tidak termasuk keuntungan atau margin yang telah ditetapkan pada saat akad.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Penelitian yang dilakukan Arta menjelaskan tentang eksistensi terkait asuransi kredit sebagai alternatif penyelesaian kredit macet yang disebabkan karena meninggalnya debitur. Hal itu memiliki persamaan dengan peneliti yang sekarang yakni membahas tentang asuransi kredit. Namun pada peneliti yang pertama hanya menjelaskan keberadaan asuransi kredit sebagai alternatif ketika debitur meninggal dunia sedangkan peneliti sekarang menjelaskan keberadaan asuransi kredit ketika debitur terkena PHK dan ketika kredit debitur dalam kondisi kredit macet.
- b. Penelitian yang dilakukan Halomoan membahas tentang peran lembaga asuransi dalam pembiayaan kredit. Dalam penelitian tersebut hanya membahas keberadaan asuransi dalam pembiayaan kredit sedangkan peneliti sekarang juga membahas bagaimana klaim asuransi.
- c. Penelitian yang dilakukan Listra meneliti mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang membahas asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

Sedangkan peneliti yang sekarang membahas mengenai Kredit MultiGuna (KMG) yang membahas asuransi kredit.

B. Teori Dan Kajian Pustaka

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman:2002). Sedangkan menurut Friedrich implementasi adalah kebijakan, suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana – sarana pendukung berdasarkan aturan – aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, arti Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum karakteristik lembaga perbankan dapat dipahami sebagai berikut :

- 1) Bank merupakan lembaga perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta memiliki fungsi untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran dengan berpedoman pada falsafah kepercayaan.

- 2) Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Karakteristik ini mengisyaratkan bahwa bank harus memperhatikan isi sumber dananya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkan dana yang telah terkumpul tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), baik untuk kegiatan usaha produktif maupun konsumtif (Ismail, 2010).

Seiring perkembangan jaman, bank tidak hanya melakukan hal sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi bank juga menawarkan berbagai macam produk jasa seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga dari luar negeri (inkaso) maupun dalam negeri (kliring), *Letter of Credit (L/C)*, *Safe Deposit Box (SDB)*, dan lain sebagainya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (simpanan) dan menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (kredit) memiliki fungsi dan tujuan yang lainnya.

Fungsi pemberijaminan mempersyaratkan agar bank dapat menjamin keamanan dana yang dipercayakan kepada pihak bank. Adapun fungsi likuiditas mengandung arti bahwa bank mampu mengembalikan dana nasabahnya pada saat jatuh tempo. Dengan demikian nasabah tidak akan ragu-ragu menempatkan dananya di bank yang bersangkutan (Latumaerissa, 2011)

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “*creditum*” yang

berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktik sehari – hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain:

Menurut Rivai (2004:4) definisi kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasaba atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selanjutnya pengertian kredit disempurnakan dalam pasal 1 butir (11) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

b. Unsur – Unsur Kredit

Unsur – unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah

yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- 4) Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

c. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- 4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
- 6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

d. Jenis Kredit

Jenis – jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya
 - a) Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif (keperluan konsumsi) seperti kredit profesi, kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan, pembelian alat – alat rumah tangga dan sebagainya.

- b) Kredit Produktif

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit produktif

sendiri terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit likuiditas.

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang – barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan terdiri dari kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

e. Prinsip – Prinsip Perkreditan

Pemberian kredit oleh suatu bank mestinya dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu :

1) Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.

2) Prinsip kehati – hatian

Prinsip kehati – hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*eksternal*)

3) Prinsip 5C

a) *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku – perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar.

Demikian juga jika trend bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya sedang menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika menurunnya itu dikarenakan kekurangan biaya.

c) *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

d) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Misalnya jika bisnis debitur adalah dibidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak monopoly oleh pemerintah.

Jika misalnya terdapat perubahan policy di mana pemerintah mencabut proteksi atau hak monopoly maka pemberian kredit terhadap perusahaan tersebut mesti ekstra hati – hati.

e) *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu bahwa undang – undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada

dalam setiap pemberian kredit. Agunana merupakan the last resort bagi kreditur, dimana akan direalisasi/dieksekusi jika suatu kredit benar- benar dalam keadaan macet.

f. Kolektibilitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar

1) Lancar

- a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
- b) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat
- c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat

2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari
- b) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
- c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
- d) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil

3) Kurang Lancar

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunhga yang telah melampaui 90 hari
- b) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya
- c) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit
- d) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

4) Diragukan

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari

- b) Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya
 - c) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - d) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit
- 5) Macet
- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada

4. Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. (Purba:1992)

Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Purba:1992)

Jika menurut paham ekonomi asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*). (Santoso:2002)

b. Unsur – Unsur Asuransi

Menurut pengertian asuransi pasal 246 KUHD, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu :

- 1) Pihak Tertanggung (*insured*), yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur – ansur
- 2) Pihak Penanggung (*insurer*), yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur – ansur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu
- 3) Suatu Peristiwa (*accident*), yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)
- 4) Kepentingan (*interest*), yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu

c. Tujuan Asuransi

Ditinjau dari beberapa sudut, maka asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahaan yang bermacam – macam, antar lain :

- 1) Dari segi ekonomi, mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Teknik pemecaham dengan cara mengalihkan risiko pada pihak lain dan piha lain

mengombinasikan sejumlah risiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.

- 2) Dari segi hukum, memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Teknik pemecahannya melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.
- 3) Dari segi tata niaga, membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Teknik pemecahannya dengan cara memindahkan risiko dari individu/perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi) yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya
- 4) Dari segi kemasyarakatan, menanggung kerugian secara bersama – sama antar semua peserta program asuransi. Teknik pemecahannya semua anggota kelompok (kelompok anggota) program asuransi memberikan kontribusinya (berupa premi) untuk menyantuni kerugian yang duderita oleh seorang/beberapa orang anggotanya.
- 5) Dari segi matematis, meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok peserta) program asuransi. Teknik pemecahannya yaitu menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan (*probability theory*) yang dilakukan oleh aktuaris maupun oleh *under writer*.

5. Asuransi Kredit

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, pemberi kredit menghadapi risiko atas kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita kerugian. Untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian, maka pemberi kredit menutup asuransi atas kredit yang diberikannya kepada nasabah. Sehingga bila ternyata di kemudian hari benar – benar kredit itu tidak dapat diperoleh kembali dari nasabah, ia memperoleh ganti rugi dari pihak penanggung.

Jadi, dalam asuransi kredit yang bertanggung adalah pemberi kredit (bank). Yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit, yaitu tidak diperoleh kembali kredit yang diberikan oleh bertanggung (bank) kepada para nasabahnya. Asuransi kredit bertujuan melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabah. Juga bertujuan membantu kegiatan, pengarahan, keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan.

Asuransi kredit juga membantu mengarahkan dan mengamankan perkreditan, misalnya dengan memasukkan syarat bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada bertanggung bila kerugian bukan disebabkan oleh perbuatan tidak pantas dari nasabah bank. Dengan adanya syarat yang demikian, maka bank tidak akan sembrono memberikan kredit kepada para pengusaha. (Santoso:2002)

6. Kredit Multiguna (KMG)

a. Pengertian Kredit Multiguna

SKIM KMG (Kredit multiguna) adalah pemberian kredit untuk segala keperluan nasabah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap (*regular income*). Diperuntukkan

kepada pegawai negeri (PNS/CPNS) yang gajinya dibayarkan melalui bank jatim atau telah ada kerja sama MOU dengan Bank Jatim

b. Kriteria Permohonan Kredit Multiguna (KMG)

Kriteria calon debitur untuk kredit multiguna yakni anggota masyarakat dengan penghasilan tetap dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN/BUMD, Lembaga pendidikan, anggota TNI/POLRI, pegawai perusahaan swasta yang *bonafide* dan pegawai koperasi yang gajinya melalui maupun tidak melalui Bank Jatim.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon pegawai BUMN/BUMD, pensiunan (PNS, pegawai BUMN/BUMD pegawai perum, purnawirawan TNI/POLRI). Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN/BUMD yang akan memasuki masa pensiun dan penerimaan uang pensiunnya melalui *payroll* Bank Jatim.

c. Syarat Dokumen Permohonan Kredit Multiguna (KMG)

Persyaratan dokumen kelengkapan kredit Multiguna (KMG) bagi pemohon:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NIP, Kartu Pegawai/Kartu PNS Elektronik (KPE), NPWP masing – masing sebanyak 2 lembar
- 2) Fotocopy surat keputusan pengangkatan pegawai tetap dan surat keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan dan dilegalisir
- 3) Pas foto berwarna sebanyak 2 lembar
- 4) Surat rekomendasi dari pimpinan instansi/ Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) / kepala sekolah, kepala dinas dimana calon debitur bekerja
- 5) Surat keterangan tentang besarnya penerimaan gaji/ pendapatan calon debitur yang diketahui oleh bendahara atau atasan pegawai tersebut
- 6) Surat kuasa memotong/ menyalurkan gaji calon debitur dari pemohon kepada Bank Jatim

- 7) Surat pernyataan dari bendahara, bahwa yang bersangkutan sanggup untuk memotong gaji/ pendapatan calon debitur sebagai angsuran pinjaman kepada bank jatim

7. Risiko

a. Pengertian Risiko

Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*), yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam menangani risiko ada lima cara yang dapat dilakukan, antara lain :

1) Menghindari Risiko (*risk avoidance*)

Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang akan dilakukan. Setelah mengidentifikasi risiko, orang dapat meneruskan kegiatannya dapat juga menarik diri dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara menarik diri, sebenarnya orang tersebut sudah menghindari risiko.

2) Mengurangi Risiko (*risk reduction*)

Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian.

Mengurangi risiko dapat berarti mengurangi peluang terjadinya atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin muncul.

3) Menahan Risiko (*risk retention*)

Tidak melakukan aktivitas apa – apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang – kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko.

4) Membagi Risiko (*risk sharing*)

Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama – sama menghadapi risiko. Misalnya dalam memulai investasi dianggap akan terlalu berisiko kalau hanya melibatkan satu orang. Oleh karena itu diajak satu atau beberapa orang untuk bekerja sama melakukan investasi tersebut.

5) Mentransfer Risiko (*risk transferring*)

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterpar*-nya gagal memenuhi kewajiban – kewajibannya kepada bank. Singkat kata, *credit risk* adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga). Risiko kredit muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dari kredit yang diberikan.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan kredit kepada nasabah, karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian dalam pemberian kredit kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang muncul pada usaha yang dibiayainya.

Disisi lain risiko kredit muncul dari sisi debitur yakni adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal debitur tersebut mampu untuk membayar. Yang kedua unsur ketidaksengajaan debitur sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam, meninggal dunia, terkena PHK, sakit yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar kredit dan lain sebagainya.

